

ABSTRAK

Aksi unjuk rasa merupakan kegiatan yang dilakukan oleh kalangan masyarakat untuk mengeluarkan aspirasi terhadap konflik sosial, politik dan ketidakpuasan masyarakat pada kebijakan pemerintah. Dalam melaksanakan aksi unjuk rasa seringkali mengalami kondisi yang anarkis sehingga menyebabkan gangguan ketertiban umum di lingkungan sekitar, maka polri sebagai penegak hukum dapat mempunyai kewenangan dalam menangani demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat. sehingga polri menjadi garda terdepan dalam menertibkan dan mengamankan aksi unjuk rasa. Penelitian ini bertujuan untuk mekanisme Kepolisian Daerah Jambi dalam menjalankan kewenangan dan tanggungjawab dalam pengamanan aksi unjuk rasa dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengamanan aksi unjuk rasa oleh Kepolisian Daerah Jambi. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan Yuridis Empiris, dengan memperoleh data melalui sampel, wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian ditarik kesimpulan secara induktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan aksi unjuk rasa pelaksanaannya harus melampirkan surat tertulis pemberitahuan kepada Polda Jambi sebagai legalitas dalam menjaga arus aksi unjuk rasa yang langsung dilaksanakan oleh Dalmas dan Samapta Polda Jambi. Upaya polda jambi dalam menangani aksi unjuk rasa dilihat dari tiga kondisi yaitu kondisi tertib yaitu kondisi yang tidak terjadi gangguan, kondisi menengah yaitu kondisi mengganggu ketertiban dan kondisi anarkis yaitu kondisi yang telah adanya korban dan merusak fasilitas negara. Adapun saran yang dapat diberikan berupa seharusnya satuan kepolisian dan instansi terkait harus berkordinasi dalam meredakan aksi unjuk rasa yang terjadi.

Kata Kunci: Ketertiban, Kewenangan, Polri, Unjuk rasa, Upaya

ABSTRACT

Demonstrations are activities carried out by segments of society to express their aspirations regarding social and political conflicts, as well as dissatisfaction with government policies. In practice, demonstrations often escalate into anarchic situations that disrupt public order in the surrounding area. Therefore, the Indonesian National Police (Polri), as a law enforcement institution, holds the authority to manage and control such demonstrations. As a result, the police become the front line in ensuring order and security during protest actions. This research aims to examine the mechanisms employed by the Jambi Regional Police in exercising their authority and responsibilities in securing demonstrations, as well as to identify efforts made to enhance the effectiveness of demonstration security. The research uses an empirical juridical approach by collecting data through samples, interviews, observation, and documentation, followed by inductive analysis. The findings indicate that in organizing a demonstration, the organizers are required to submit a written notification to the Jambi Regional Police as a legal requirement. This process ensures that the demonstration is managed directly by the Dalmas and Samapta units of the Jambi Regional Police. The efforts of the Jambi police in handling demonstrations are categorized into three conditions: orderly condition, where no disturbances occur, moderate condition, where public order is disrupted and anarchic condition, where there are casualties and damage to state property. As a recommendation, it is suggested that the police units and related agencies must coordinate effectively in de-escalating demonstrations and maintaining public order.

Keywords: Attempt, Authority, Demonstration, Order, Police